

Petugas Lapas Kelas I Semarang Temukan Bola Tenis Berisi Sabu

JAKARTA (IM) - Bola tenis berisikan paket narkoba ditemukan petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang pada Rabu (15/12). Bola tenis tersebut ditemukan tidak jauh dari pos pengamanan tiga Lapas Semarang, Jawa Tengah.

Narkoba yang ada di dalam bola tenis tersebut berisikan empat klip plastik warna putih diduga sabu seberat 18 gram, empat tablet pil Alprazolam 1 mg, dan 10 tablet pil Trihex 2 mg. Paket narkoba tersebut diduga hendak diselundupkan ke dalam Lapas Semarang.

Kalapas Kelas I Semarang, Supriyanto membenarkan temuan bola tenis yang telah dilabkan coklat berisikan paket narkoba. Barang bukti pakt narkoba dalam bola tenis tersebut diserahkan ke pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti.

"Barang bukti pada penemuan ini selanjutnya diserahkan ke pihak Kepolisian Sektor Ngalayan dan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Supriyanto melalui keterangan resminya, Kamis (16/12).

Supriyanto menegaskan, pihaknya tidak akan main-main terhadap penyelundupan narkoba ke dalam Lapas Semarang. Hal itu, sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-PK.02.10.01-1442 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penindakan Terhadap Peredaran Gelap Narkoba Pemasyarakatan.

"Penemuan ini merupakan wujud nyata keseriusan kami dalam memerangi peredaran gelap narkoba dan bersinergi dengan aparat penegak hukum terkait. Baik Warga Binaan Pemasyarakatan maupun petugas yang terbukti terlibat, dipastikan akan ditindak tegas," tandasnya. ● **mei**

KPK Dalam Aliran Fee Terkait Proyek Infrastruktur di Dinas PUPR Kota Banjar

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kota Banjar Tomy Subagia, untuk menggali informasi aliran uang berupa fee terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017.

Tomy Subagia diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, (15/12).

"Tomy Subagia dikonfirmasi mengenai dugaan adanya aliran uang yang dinikmati oleh pihak yang terkait dengan perkara ini yaitu berupa fee atas pengerjaan proyek di Dinas PUPR Kota Banjar," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (16/12).

KPK melakukan penyelidikan dugaan korupsi di proyek pekerjaan infrastruktur pada dinas PUPR Kota Banjar tahun 2012-2017. Namun, KPK belum menjelaskan siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Ali mengatakan, informasi terkait kasus tersebut baru akan diumumkan ketika para tersangka dan dituntut atau ditahan.

"Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kebijakan pimpinan KPK terkait ini adalah pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan telah dilakukan," kata Ali, Jumat (10/7). ● **mei**

5 Orang Suspek Omicron, Dua WNI Habis dari AS dan Tiga WN Tiongkok

JAKARTA (IM) - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin mengatakan kasus Omicron pertama di Tanah Air terjadi di fasilitas karantina Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Kasus Omicron yang sudah kita konfirmasi satu (kasus) dan lima kasus probable itu terjadi di karantina," kata Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers perkembangan COVID-19 yang diikuti melalui Zoom di Jakarta, Kamis (16/12).

Budi mengatakan, kasus Omicron yang dialami seorang petugas kebersihan RS Wisma Atlet Jakarta berinisial N diketahui berdasarkan hasil analisa genom sekuensing yang diterima Kemenkes RI pada 15 Desember 2021.

"Petugas pembersih ini tidak memiliki riwayat perjalanan luar negeri," katanya.

"Jadi karena dia melayani pasien, akibatnya dia tertular," katanya menambahkan.

N selama ini tinggal di asrama Wisma Atlet Jakarta. Selain N, pihak Kemenkes juga telah mendeteksi 5 kasus probable Omicron yang melibatkan pelaku perjalanan internasional dari warga negara Indonesia serta asing.

Lima orang suspek Omicron itu di antaranya dua kasus adalah WNI yang baru kembali dari Amerika Serikat dan Inggris. Keduanya sedang menjalani isolasi di Wisma Atlet. Tiga kasus probable lainnya WNA asal China yang berkunjung ke Manado dan sekarang di karantina di Manado.

Budi memastikan hingga sekarang belum muncul laporan transmisi komunitas dari kasus yang dialami N di Wisma Atlet. Kemenkes telah meningkatkan presentasi pemeriksaan sampel genom sekuensing dari seluruh kasus konfirmasi yang terjadi di Tanah Air dalam rangka mendeteksi dini potensi transmisi komunitas Omicron.

"Standar whole genome sequencing (WGS) biasanya 5 persen, sekarang kita mau lakukan 10 persen. Semua kasus konfirmasi kita lakukan WGS," katanya.

Upaya berikutnya adalah mengencarkan penggunaan reagen PCR menggunakan S-gene target failure (SGTF) agar Omicron bisa diketahui lebih cepat.

"Sebab SGTF ini bisa memberikan marker atau indikasi dini bahwa kalau PCR positif kemungkinan besar Omicron," katanya.

Budi mengatakan, metode PCR SGTF lebih cepat mendeteksi dini Omicron bila dibandingkan metode WGS.

"Tas PCR hasilnya bisa kita peroleh empat sampai enam jam, untuk genom sekuensing masih butuh lima sampai tujuh hari," tandasnya. ● **mar**

2 Polhukam

FOTO/ANT



RAPAT PARIPURNA PENUTUPAN MASA SIDANG DPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri) menyerahkan dokumen kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) pada Rapat Paripurna ke-11 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12). Dalam rapat tersebut DPR mengesahkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan serta penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022.

UU TPKS Tidak Kunjung Disahkan DPR, Cerminkan Tak Punya Sense of Crisis

RUU TPKS sangat mendesak untuk disahkan, mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang baru terungkap ke permukaan dalam beberapa waktu terakhir ini.

JAKARTA (IM) - Anggota Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah mempertanyakan janji anggota dewan yang ingin mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Luluk menilai bahwa tidak adanya agenda pengesahan RUU TPKS di dalam rapat paripurna penutupan masa sidang DPR pada Kamis (16/12) mencerminkan bahwa anggota dewan tak memiliki sense of crisis.

"Kalau kemudian ada janji (RUU TPKS) akan dibahas di masa sidang yang akan datang, itu kapan?" ungkap Luluk ke-pada wartawan selepas sidang.

Anggota Komisi IV DPR itu pun sempat menyampaikan interupsi di dalam rapat paripurna agar RUU ini disahkan dalam sidang. Selain itu, mayoritas fraksi di parlemen juga telah setuju RUU ini disahkan menjadi inisiatif DPR. Namun pada akhirnya rapat paripurna tidak memasukkan RUU ini sebagai salah satu RUU yang disahkan.

"Karena RUU yang lain itu nasibnya juga mirip. RUU PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga) juga sele-

sai di Badan Legislatif, tinggal dirapurkan, ternyata juga menunggu 1,5 tahun dan tidak juga disahkan," jelasnya.

Luluk menegaskan, RUU TPKS sangat mendesak untuk disahkan. Apalagi, kata dia, bila melihat banyaknya kasus kekerasan seksual baru terungkap ke permukaan dalam beberapa waktu terakhir.

Beleid itu, imbuh dia, diharapkan dapat mengatur mekanisme dan ketentuan yang jelas untuk merehabilitasi dan memulihkan trauma korban, hingga memasukkan tanggung jawab pencegahan kekerasan seksual kepada semua kementerian/lembaga.

"Saya kira kita tidak ingin menciptakan para korban-korban baru yang akan terus bertambah jumlahnya," ujar Luluk.

"Ada tanggung jawab semua kementerian dan lem-

baga negara, bahwa kekerasan seksual ini bisa menjadi musuh bersama, dicegah, dan diatasi secara sistem," katanya.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa pengesahan RUU TPKS hanya tinggal persoalan waktu.

"Tentunya pimpinan beserta DPR akan insya Allah secepatnya pada awal masa sidang yang akan datang segera memutuskan dan ini tidak ada masalah apa-apa," ujar Puan kepada wartawan selepas Paripurna, Kamis (16/12).

Puan mengatakan, DPR tengah mengupayakan waktu yang tepat untuk dapat mengesahkan RUU TPKS sebagai inisiatif DPR. Ia membantah bahwa tak masuknya RUU TPKS dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis (16/12) lantaran tidak ada kata sepakat di antara pimpinan DPR.

"Ini hanya masalah waktu karena bahwa tidak ada waktu yang pas, atau cukup untuk kemudian dilakukan secara mekanisme yang ada," ujar Puan.

Kendati tak masuk rapat paripurna hari ini, Puan memberikan bocoran bahwa RUU TPKS akan masuk pada agenda rapat paripurna awal masa sidang setelah masa reses DPR. Namun, ia juga mengingatkan bahwa RUU TPKS harus tetap melalui mekanisme yang berlaku sehingga dapat menghasilkan UU yang baik.

"Tentunya pimpinan beserta DPR akan insya Allah secepatnya pada awal masa sidang yang akan datang segera memutuskan dan ini enggak ada masalah apa-apa," ucap Puan.

Ia menambahkan, DPR mendukung penyusunan hingga pengesahan RUU TPKS yang dibutuhkan oleh publik untuk mengatasi dan mencegah kekerasan seksual. ● **han**

Varian Omicron Masuk Indonesia, Waspada dan Patuhi Prokes 3M

JAKARTA (IM) - Varian baru Covid-19 Omicron, telah terdeteksi masuk Indonesia. Kasus positif Omicron pertama dilaporkan berasal dari seorang pekerja pembersih Wisma Atlet berinisial N, pada Rabu (15/12).

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengatakan, meski sudah masuk ke Indonesia, masyarakat diminta untuk tidak khawatir dan panik berlebihan. Masyarakat disarankan tetap hidup seperti biasa.

Salah satu hal yang bisa dilakukan masyarakat adalah meningkatkan kewaspadaan dengan tetap disiplin dan jangan kendor menerapkan protokol kesehatan (prokes).

Bahkan Menkes Budi juga mengimbau masyarakat untuk tidak bergembar ke luar negeri karena sangat berpotensi untuk membawa masuknya virus.

"Kurangi perjalanan ke luar negeri yang tidak penting. Sekarang penyebaran Omicron ini memang sangat cepat. Di Inggris yang tadinya cuman 10 per hari, sekarang sudah 70 ribu per hari. Lebih tinggi dari puncaknya di Indonesia pada Juli yakni 50 ribu kasus," kata Menkes Budi, dalam Keterangan Pers Terkait Perkembangan Pandemi Covid-19 yang disiarkan langsung di channel YouTube Kementerian Kesehatan, Kamis (16/12).

Perlu diketahui bahwa virus Corona varian baru, Omicron, sangat cepat. Meski demikian, masyarakat harus tetap tenang dan jangan sampai panik berlebihan, tapi harus tetap waspada.

Sayang, respon masyarakat Indonesia terhadap penerapan prokes 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak saat bertemu orang lain, sudah mulai kebor. Hal ini dapat dilihat di pasar-pasar tradisional, di mana banyak pedagang dan pengunjung pasar yang tidak memakai masker. Selain itu, ada juga pedagang yang sengaja melorot masker hingga dagu. Demikian juga di jalan-jalan banyak terhat warga yang tak lagi memakai masker, seolah-olah pandemi Covid-19 di Indonesia sudah tak ada lagi.

Berdasarkan pantauan di sepanjang Jalan Pramuka, Rawalumbu, Kota Bekasi Timur, banyak warga baik itu pejalan kaki atau yang boncengan sepeda moto yang tidak mengenakan masker. Alasan mereka tak memakai masker pun beragam. Ada yang mengatakan karena sesak, ada yang mengaku tak nyaman kalau sepanjang hari pakai masker.

Ketika disingung soal Covid-19 varian baru, Omicron, beberapa warga mengaku pernah mendengar informasi bahwa varian baru itu lebih cepat menular.

"Saya kalau pergi-pergi baru pakai masker. Ini kan perginya hanya ke warung, dekat rumah lagi, jadi aku pakai masker," kata seorang yang ditemui di salah satu warung di Kawasan Perumahan Narongong Indah, Bekasi, Kamis (16/12) siang.

Berdasarkan Data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menunjukkan bahwa nilai kepatuhan 3M terus menurun sejak November lalu. Warga terkesan abai karena angka keterjangkitan virus melanda.

Dilansir dari ppid.jakarta.go.id, angka kepatuhan dalam penerapan prokes terlihat dari laporan Satpol PP DKI Jakarta yang masih mendapatkan hasil dari penindakan pelanggaran prokes. Sampai 11 Desember 2021, Satpol PP mendapatkan Rp3,7 juta dari denda masker atau tertingggi dalam sepekan terakhir.

Menurut data Satgas Penanganan Covid-19, sebenarnya Indonesia telah berhasil menurunkan kasus aktif maupun kasus harian 150 hari terakhir pascapuncak kasus harian tertinggi pada 15 Juli 2021.

Bahkan menurut catatan Satgas Covid-19, pada Oktober 2021 angka kepatuhan masyarakat konsisten di atas 8 (dengan rentang skor 1-10). Kepatuhan memakai masker di angka 8,23, diikuti kepatuhan mencuci tangan 8,09 dan skor kepatuhan menjaga jarak 8,03.

Sedangkan, sepanjang November lalu skornya turun di angka 7,86 (masker), 7,85 (jaga jarak), dan 7,91 (cuci tangan).

Sonny menyangkan tren penurunan terus berlanjut di Desember ini. Sejak 1 hingga 11 Desember 2021, angka kepatuhan memakai masker turun menjadi 7,74 dan kepatuhan menjaga jarak serta mencuci tangan juga melemah.

Ia memaparkan dalam Daftar Pengawasan Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19 juga terlihat selama periode 1 hingga 11 Desember 2021, masih terdapat 59 kabupaten/kota yang kurang dari 75% penduduknya memakai masker. Sedangkan kabupaten/kota dimana kurang dari 75% penduduknya yang menerapkan

PENGUMUMAN

Dengan ini diberitahukan sehubungan dengan rencana pengambilalihan mayoritas saham pada Perseroan Terbatas PT AURORA CAHAYA INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Utara ("Perseroan") maka akan dilangsungkannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa serta pengambilan keputusan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan.

Demikian pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka untuk masing-masing pihak yang memerlukan informasi atau bermaksud untuk mengajukan keberatannya secara tertulis dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada alamat Perseroan:

PT AURORA CAHAYA INDONESIA
Landmark Pluit Tower D6 Lantai 3, Jalan Pluit Selatan Raya,
Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, 14450.
ttd
Direksi Perseroan

PENGUMUMAN

Dalam RUPS PT. DANUIS BERKAH AMANAH, yang Berita Acaranya dibuat dgn agenda tertg 06 Desember 2021 No. 12, dibuat di hadapan Jerry Valentina Andriana, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang, telah diputuskan sebagai berikut:

-Menyetujui pengurangan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah) dan Modal Setor Perseroan dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta Rupiah) menjadi Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah). Atas pengurangan Modal Dasar dan Modal Setor Perseroan, maka menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat 1 & 2 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut.

Demikian hasil RUPS-LB ini diberitahukan untuk diketahui.

Jakarta, 17 Desember 2021
Direksi PT. DANUIS BERKAH AMANAH

PENGUMUMAN RENCANA PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND

PT Syailendra Capital, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND ("SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND"), dengan ini mengumumkan rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND terkait hal-hal sebagai berikut:

- Penerapan ketentuan Kelas Unit Penyeretaan (*multi share class*) dalam SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND. Pokok-pokok perubahan yang akan dilakukan terhadap KIK SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND terkait dengan penerapan Kelas Unit Penyeretaan (*multi share class*) adalah sebagai berikut:
 - Penerbitan Kelas Unit Penyeretaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND sebagai berikut:
 - SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND KELAS A; dan
 - SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND KELAS B.
 - Perubahan dan/atau penambahan beberapa definisi baru antara lain definisi Kelas Unit Penyeretaan, Pemegang Unit Penyeretaan, Penawaran Umum Kelas Baru, Tanggal Penambahan Kelas Unit Penyeretaan dan Unit Penyeretaan;
 - Perubahan ketentuan mengenai Unit Penyeretaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND, antara lain (i) penambahan jumlah Unit Penyeretaan yang ditawarkan baik untuk SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND maupun untuk masing-masing Kelas Unit Penyeretaan, (ii) segmentasi Kelas Unit Penyeretaan, serta (iii) ketentuan mengenai penambahan jumlah Kelas Unit Penyeretaan dan jumlah Unit Penyeretaan masing-masing Kelas Unit Penyeretaan;
 - Penambahan ketentuan peralihan bahwa Pemegang Unit Penyeretaan yang telah memiliki Unit Penyeretaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND akan menjadi Pemegang Unit Penyeretaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND Kelas A tanpa menyebabkan perubahan jumlah kepemilikan Unit Penyeretaan;
 - Penambahan ketentuan bahwa setiap Unit Penyeretaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyeretaan sebesar Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyeretaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND yang berjalan dan dalam hal Manajer Investasi melakukan penerbitan setiap Kelas Unit Penyeretaan baru, maka Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyeretaan adalah sebesar Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal per Kelas Unit Penyeretaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND berjalan;
 - Perubahan ketentuan Tata Cara Penjualan Unit Penyeretaan, Tata Cara Pembelian Kembali Unit Penyeretaan dan Tata Cara Pengalihan Investasi sehingga ketentuannya berlaku untuk masing-masing Kelas Unit Penyeretaan, termasuk penetapan ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyeretaan, batas minimum penjualan kembali Unit Penyeretaan, batas minimum pengalihan investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyeretaan, berdasarkan Kelas Unit Penyeretaan;
 - Perubahan ketentuan imbalan jasa Manajer Investasi sesuai dengan masing-masing Kelas Unit Penyeretaan; dan
 - Penambahan ketentuan Penambahan dan Penutupan Kelas Unit Penyeretaan.
- Penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KIK dan Prospektus SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") antara lain sebagai berikut:
 - POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelenggaraan Sengketa Sektor Jasa Keuangan; dan
 - SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Alau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Rincian rencana perubahan KIK dan Prospektus dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyeretaan SYAILENDRA EQUITY OPPORTUNITY FUND serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA Jakarta, 17 Desember 2021
Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN

PT KARYA MULIA WISATA, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa terhadap Perseroan akan dilakukan pengalihan saham-saham Perseroan sehingga atas pengambilalihan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pemegang saham pengendali pada Perseroan.

Bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan termasuk kreditor dapat menghubungi atau mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:

PT KARYA MULIA WISATA
Grha Baramulita, Komplek Harmoni Plaza Blok A-8
Jl. Suryopranoto No. 2, Petjojo Utara, Gambir
Jakarta Pusat - 10130

Pengumuman ini dibuat guna memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 127 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Horat kami,
Direksi PT KARYA MULIA WISATA

PENGUMUMAN RENCANA PEMBUBARAN REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1

PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 ("Manajer Investasi") dengan ini mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 ("SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1").

Berikutan dengan rencana tersebut di atas, dengan ini Manajer Investasi menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Manajer Investasi dan PT Bank Permata Tbk selaku Bank Kustodian SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1, telah sepakat untuk melakukan pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 sebagaimana termaktub dalam Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 tertanggal 15 Desember 2021, yang antara lain menyatakan bahwa seluruh Efek berikat utang yang menjadi basis nilai proteksi dalam portofolio investasi SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 telah jatuh tempo pada tanggal 22 November 2021 dan Manajer Investasi telah melakukan pelunasan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran pelunasan atas seluruh Unit Penyeretaan SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 yang telah diterbitkan kepada seluruh Pemegang Unit Penyeretaan, sehingga ditandatanganinya Kesepakatan Pembubaran REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 sudah tidak ada lagi Pemegang Unit Penyeretaan yang tersisa dalam REKSA DANA SYARIAH TERPROTEKSI SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1.
- Manajer Investasi telah memberitahukan rencana pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan telah menginstruksikan Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 sejak tanggal 17 Desember 2021.
- Pembubaran dan dimulainya proses likuidasi akan dilakukan dengan ditandatanganinya akta pembubaran SYAILENDRA CAPITAL PROTECTED FUND SYARIAH 1 di hadapan notaris.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh publik.

SYAILENDRA Jakarta, 17 Desember 2021
PT Syailendra Capital
terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan